

KORUPSI DI PESANTREN; DISTORSI PERAN KIAI DALAM POLITIK

Rudy Haryanto

(Dosen Muamalah dan Perbankan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, nomor kontak 0324 321123,
rrudy_haryanto@yahoo.com, alamat Jl. Pahlawan Km 04 Pamekasan)

Abstract

Nowadays, there are many Kiai facing distorsi of kekiiaannya. Kiai tends to be politician now. It is difficult to look for a careful kiai if he is given an unclear thing of its purpose. Being careful in his action was a part of kiai's consistency in the past to keep it to all people especially political party. In occasion of showing one sidedness to the religion norms and the society. Now some kiai openly become politician and involve in activity to support political activity. It means kiai coming to public area that is susceptible to corruption. Therefore, it gets difficulty to find a careful kiai in their action, hold the religion forms, and put their religious community forward. This kind of kiai have 'keintiman' with God, strong spiritual relationship with their society. Because of their kindness makes them not easy to be tempted by the power that tend to do corruption.

Kata-kata kunci

Pesantren, Kiai politik, dan korupsi

Pendahuluan

"Penyuap dan penerima suap tempatnya di neraka." (al-Hadits), Petuah kanjeng Nabi saw singkat di atas memiliki pesan moral sangat dalam. Pertama, suap merupakan perbuatan dilarang agama. Kedua, pelaku dan penerima suap otomatis terjerat hukuman. Simbul hukuman adalah neraka atau dalam bahasa keseharian di dunia dikenal sebagai penjara. Petuah di atas sekaligus mengandung pesan bahwa Islam sangat concern, peduli, membentengi (*preventif*) umat dari tindak

tercela semacam penyuapan dan menghentikan perilaku korup (*kuratif*). Suap dalam hukum positif sebagai salah satu bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Disaat rejim Orde baru mulai menuai keruntuhannya dan lahirnya era transisi di negeri ini, yang ditandai oleh liberalisme politik, ternyata praktik korupsi tidak jauh berbeda. Alih-alih berkurang, justru korupsi terjadi semakin marak. Praktik korupsi mengalami proses transformasi seiring dengan pergeseran pusat kekuasaan. Pada masa orde baru

korupsi harus melalui istana, atau paling tidak harus setor ke istana atau bisa dikatakan praktik korupsi hampir sebagian besar berkutat di wilayah birokrasi. Pasca orde baru korupsi dilakukan secara sporadis oleh semakin banyak pelaku sehingga yang terjadi menyerupai *democratic corruption*. Munculnya pusat kekuasaan baru diluar istana, seperti parlemen dan partai politik, memperluas praktik korupsi. Situasi seperti ini meruntuhkan argumentasi bahwa korupsi berkembang subur dibawah pemerintahan yang otoriter karena yang terjadi pada Indonesia pasca orde baru justru sebaliknya. Liberalisme politik ternyata justru memberi ruang dan peluang bagi liberalisme korupsi.¹

Korupsi ibarat sebuah lingkaran setan, tak jelas ujung pangkalnya. Korupsi juga sudah menjadi bagian budaya masyarakat, melibatkan hampir semua sektor dan dilakukan siapapun, tak peduli predikat yang disandangnya. Pejabat, rakyat biasa, bahkan oleh seorang kiai sekalipun. Ibarat penyakit, korupsi di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam ini sudah terlanjur kronis. Dahulu Ulama atau Kiai² benar-benar kawan masyarakatnya,

menjadi tum-puan, tempat bertanya dan meminta pertolongan. Sebaliknya Kiai yang dipuja dan dihormati masyarakat itu memang mencintai masyarakatnya, dan seperti mewakafkan dirinya untuk mereka. Ulama atau Kiai yang termasuk golongan mereka yang melihat masyarakat dengan mata kasih sayang. Memberikan pelajaran bagi yang bodoh, membantu yang lemah, menghibur yang menderita dan seterusnya.

Namun, beberapa tahun terakhir ini Kiai yang demikian ini tak pernah kita temukan, kita malah sering menemukan Kiai- Kiai berebut kekuasaan misalnya menjadi anggota dewan, bupati, gubernur bahkan sampai presiden. Masyarakat pun dibuat bingung, dalam kondisi krisis multi dimensi, saat ini masyarakat tak punya teman, tempat bertanya, menaruh harapan pun mereka kebingungan. Dimana Kiai yang selama ini dijadikan guru tempat curhat dan meminta pertolongan sekarang meninggalkannya. Tidak disadari bahwa perilakunya tersebut akan memunculkan konflik horizontal masyarakat. Kemudian siapa lagi yang akan mengendalikan masyarakat? bahkan bangsa ini? jika para kiaiinya ramai-ramai bermain politik atau menjadi tokoh politik.

Perilaku politik akan selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan/tujuan. Kemudian banyak orang mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup karena mereka selalu melakukan kompromi-kompromi politik yang terselubung dan masyarakat tak mengerti, disamping transparansi yang ada di birokrasi kita belum begitu berjalan atau memang sengaja di buat untuk kepentingan kekuasaan.

Korupsi yang secara umum diartikan sebagai penyalahgunaan ke-

¹ Untuk mendapatkan gambaran tentang tingginya tingkat korupsi pasca tumbangnya pemerintahan orde baru, dapat dilihat dari laporan *Transparency International* (TI). Setiap tahun TI menerbitkan hasil survei *Corruption Perception Index*. Sejak tahun 1998 sampai sekarang, Indonesia berada di peringkat atas negara-negara terkorup di dunia.

² Ulama atau Kiai di Indonesia merupakan pemimpin Islam, karena dalam kacamata Syi'ah kepemimpinan yang melanjutkan kepemimpinan Nabi. Sedangkan Ulama adalah pewaris Nabi. Kreteria dari ulama ini adalah harus mujtahil mutlak, berkepribadian bersih, dan paham dengan seluk beluk ilmu keislaman seperti tasafuf, filsafat, politik dsb. Lebih jelas baca Nanih Machdrawaty. *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Idiologi, Strategi, sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001. hal 15

kuasaan atau sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi. Sekarang berkembang pesat seluruh lapisan masyarakat akhir-akhir ini para pejabat eksekutif, legislative, lembaga pemberantasan korupsi dan peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, KPK dari pusat sampai daerah, banyak yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Dimana manusia bukanlah malaikat, keimanannya selalu naik turun saat dihadapkan pada persoalan kemegahan, manusia akan tergiur jika kondisi keimannya dalam kondisi menurun.

Pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah kota di Indonesia secara langsung sebagai bentuk pengembangan demokrasi di pusat dan daerah. Hal ini tidak serta merta menjadi harapan terciptanya demokrasi. Selama ini banyak kita tahu bahwa setiap suksesi pemilihan anggota legislative, presiden, dan bupati para kandidat dan atau pengurus partai tak luput dengan permainan *money* politik. Kekhawatiran ini tambah menyedihkan ketika Kiai ikut-ikutan mendukung-mendukung secara tidak sadar ataupun sadar ikut dimainkan sebagai *pendulang* suara. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi politisasi warga yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan *reaward*-imbalan jasa- dari yang didukungnya dan perilaku inilah yang mengarah pada korupsi.

Berangkat dari sinilah perilaku korupsi ini akan muncul dan terjadi setiap saat. *Astaqfirullah !!* Ironis sekali memang, jika para Kiai melakukan tindakan korupsi, karena Kiai pada saat sudah masuk pada wilayah birokrasi baik eksekutif maupun legislative. Namun ini adalah kenyataan yang terjadi saat ini.

Fenomena ini seringkali kita dapati di daerah-daerah, Kiai yang dulunya

konsern di dalam pengembangan masyarakat memberikan pendidikan politik kebangsaan terhadap masyarakatnya, membangun sikap jujur di dalam masyarakatnya sekarang beralih profesi menjadi politisi- politisi yang membohongi masyarakatnya sendiri hanya untuk kepentingan kekuasaan dan dinikmati oleh segelintir orang saja. Ini yang sangat disayangkan oleh kita semua, yang seharusnya para Kiai menjaga jarak dengan kekuasaan ataupun partai politik dan tentunya lebih tertarik di pemberdayaan masyarakat.

Pada akhir Juli tahun 2002, Munas alim Ulama NU di Jakarta mengeluarkan fatwa kepada para koruptor "Jenazah koruptor tidak wajib disholati" Selain itu, pada akhir tahun 2003, PBNU dan PP. Muhamadiyah mendeklarasikan Gerakan Nasional anti Korupsi di PP. Al-Hikam Malang. Dua langkah gerakan tersebut dianggap oleh beberapa LSM dan masyarakat langkah yang sangat maju berani karena di sokong oleh landasan teologis yang sangat kuat.³ Saat itu masyarakat menaruh harapan besar

³ Semangat gerakan moral PBNU dan PP. Muhamadiyah mendeklarasikan Gerakan Nasional anti Korupsi tersebut karena berabagai alasan, antara lain: *Pertama*, korupsi di negeri ini tambah hari kian parah. Negeri kita ini, juara bertahan dalam hal korupsi di antara negara-negara di dunia, dan selalu menjadi salah satu negeri terparah korupsinya. *Kedua*, gerakan reformasi yang sudah berjalan sejak 1998, yang salah satu agenda utamanya adalah pemberantasan korupsi, ternyata tak kunjung berhasil. Korupsi di era reformasi dan era ekonomi daerah ini ternyata justru kian parah dan menjadi-jadi. *Ketiga*, era otonomi daerah, yang merupakan salah satu buah hasil dari gerakan reformasi, sudah berlangsung mulai Januari 2001. Tetapi, ironisnya, korupsi di era otonomi daerah ini juga kian parah, kian melebar ke mana-mana. Jika di era orde baru dengan sifat sentralistiknya, korupsi seolah hanya terbatas dilakukan oleh orang-orang tertentu di tingkat atas, tetapi sekarang sudah merambah kesemua tingkatan. Baca Mundzar Fahman, *Kiai dan Korupsi: Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam Korupsi*. Surabaya: Jawa Post Pres, 2004. hal x-xi

kepada NU akan pentingnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Lambat laun gerakan itu terdengar sumbang bahkan terkesan menjadi jargon belaka. Karena setelah itu pula banyak orang Kiai-Kiai NU dan Muhammadiyah terlibat kasus korupsi dimana-mana. Sepertinya, Kiai sekarang mengidap virus *politioal myopic* atau suatu kegalauan melihat visi politik kedepan.

Korupsi

*Korupsi*⁴, istilah ini begitu populer dikalangan masyarakat, terutama pejabat. Korupsi kemudian identik dengan kejahatan oleh orang elit, yaitu orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam satu badan atau lembaga. Korupsi juga dapat digolongkan dalam satu bentuk kejahatan berkerah putih atau *white collar crime*⁵, Kejahatan model ini,

⁴ Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah bagian dari sistem itu sendiri. Karena itu, bukan pekerjaan gampang untuk memberantas korupsi karena aparat penegak hukum sering berada pada situasi yang dilematis. Apalagi, korupsi adalah kejahatan yang melibatkan banyak pihak dan seringkali sulit untuk diungkap. Lebih jelas baca Wangsiatu Zakiyah, ad all. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta, LKiS, 2002, hal 19

Terkait dengan definisi umum tentang korupsi, Robert Klitgaard merumuskan pengertian umum tentang korupsi dalam rumusannya yang terkenal. $C = M + D - A$ Korupsi ($C = corruption$) adalah fungsi dari monopoli ($M = monopoly$) ditambah kewenangan ($D = discretion$) lalu dikurangi dengan akuntabilitas ($A = Accountability$). Jadi, menurut Klitgaard korupsi terjadi apabila ada monopoli kekuasaan di tengah ketidakjelasan aturan dan kewenangan, tetapi tidak ada mekanisme akuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada publik.

Walaupun mampu memberikan penjelasan yang sederhana, rumus umum Klitgaard tidak mampu untuk menjelaskan praktik-praktik korupsi. Baca Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, terj. Masri Maris. Jakarta. YOI, 2002, hal 29

⁵ *White collar crime* merupakan bentuk kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, orang yang sedikitnya mempunyai peran dan pengaruh, atau bahkan orang yang *well-educated* alias orang yang

bagimanapun juga lebih parah dibandingkan dengan kejahatan kriminal biasa. Logikanya, kejahatan biasa mungkin hanya merugikan satu atau beberapa orang saja, sedangkan korupsi yang dirugikan bisa sampai seluruh penduduk negeri. Lagipula, korupsi adalah kejahatan berlipat ganda, selain menawarkan dosa pribadi pelaku korupsi juga harus menanggung dosa munafik, akibat melakukan kejahatan dengan kecurangan dan sembunyi-sembunyi lebih-lebih dilakukan oleh orang yang terhormat.⁶

Dalam praktek korupsi diperlukan sebuah jaringan. Jaringan korupsi menurut William J. Chambliss (2001),

berpendidikan tinggi. Dalam konsep ini korupsi hampir tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa yang tidak mempunyai ruang kekuasaan.

⁶ Dalam kenyataan akhir-akhir ini prestasi Indonesia sebagai negara yang paling korup di dunia tentu bukanlah satu prestasi yang membanggakan. Bahkan rekor ini pula yang telah menyeret Indonesia dari negara berkembang menjadi negara miskin. Ratusan trilyun uang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat *diembat* oleh koruptor. Dalam soal korupsi, sedikitnya ada empat kenyataan yang terjadi dan semakin menggejala akhir-akhir ini, dan begitu sangat memprihatinkan. *Pertama*, kenyataan bahwa korupsi ini semakin melebar dan menyebar kemana-mana. Tidak hanya dipusat, tapi di daerah-daerah. Tidak hanya di eksekutif tapi legislatif pun kini sudah menjadi sasaran baru korupsi di negeri ini. *Kedua*, kenyataan bahwa korupsi kini lebih vulgar. Kalau dulu korupsi dibawah meja, kini terang-terangan diatas meja. *Ketiga*, kenyataan bahwa aparat penegak hukum kita juga tidak lebih bagus daripada sebelum reformasi. Di era sekarang ini banyak aparat penegak hukum yang brengsek, yang hobinya menjadikan hukum dan keadilan sebagai komoditi penghasil uang. Kita semakin sulit menemukan aparat penegak hukum yang masih punya hati nurani. *Keempat*, kenyataan bahwa banyak di antara kita yang melakukan sesuatu yang justru bisa mendorong orang lain "*terpaksa*" melakukan korupsi misalnya anggota dewan yang "*terpaksa*" korupsi karena ketika menjelang dan selama pemilu dia sudah terkanjur habis banyak karena dimintai dana sana-sini. Juga gubernur/bupati/wali kota yang terpaksa korupsi saat menjabat karena untuk menservis anggota dewan. Padahal tidak sedikit juga kiai yang menjadi anggota dewan dan gubernur/bupati/wali kota.

melibatkan elit pusat kekuasaan antara lain pucuk pimpinan eksekutif, elit partai politik, petinggi lembaga peradilan dan kalangan bisnis. Dari perspektif ini, korupsi bekerja tidak sekedar berupa pencurian uang negara, pemerasan ataupun penyuapan. Tetapi, termasuk juga perspektif korupsi politik melihat korupsi juga terjadi pada proses politik. Yaitu pada pembuatan kebijakan publik dan implementasinya yang memberikan keuntungan kepada pembuat kebijakan atau kroninya.⁷

Untuk mengkategorikan berbagai tindakan yang termasuk korupsi, Syed Husein Alatas telah melempar secara ringkas berdasarkan penelitiannya di Asia, terutama di Malaysia dan Indonesia. Ada tujuh kategori korupsi menurut Alatas yaitu : Korupsi transaktif, pemerasan, investif, perkerabatan (*nepotisme*), defensif, otogenik (*autocorruption*, dan dukungan.⁸

⁷ Lebih jelas baca Wangsiatu Zakiyah, ad all. *Op.cit*, hal 20-21

⁸ *Korupsi transaktif* yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif dalam menjalankan perbuatan tersebut. *Korupsi pemerasan* yaitu jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya. Korupsi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas termasuk jenis korupsi pemasaran. *Korupsi investif* yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh pada masa mendatang. Bentuk uang bulanan secara rutin kepada hakim. Harapannya, kelak ketika kasusnya masuk ke pengadilan, hakim yang telah digajinya langsung menangani perkaranya. *Korupsi perkerabatan (nepotisme)* yaitu penunjukan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan, atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. *Korupsi defensif*. Korupsi jenis ini dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Dengan demikian, orang yang diperas melakukan korupsi untuk menyelamatkan kepentingannya. Korupsi seperti ini sering dilakukan oleh keluarga terdakwa yang tidak

Hal yang lebih mengerikan adalah tindakan korupsi juga merupakan kolaborasi dari beberapa kejahatan sekaligus, yaitu pencurian, penghianatan, dan pengecewaan terhadap rakyat. Hal ini tentu lebih hina sebagaimana dalam bahasa pesantren pelaku korupsi adalah termasuk kategori orang yang bakal berada di lembah *asfalasaafilin*⁹. Maka dari itu, memang sudah menjadi wajib hukumnya untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada koruptor ketimbang pada para pelaku kejahatan biasa.¹⁰

Sayangnya, di negara kita ini belum ada komitmen yang kuat baik dari pihak pemerintah maupun pembuat undang-undang untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya pada para koruptor tersebut. Para koruptor bahkan masih diperlakukan istimewa ketika dia sedang menjalani proses hukum, sementara seorang yang mencuri ayam tetangga karena kelaparan justru mendapat perlakuan atau mungkin

ingin terdakwa ditahan atau diproses lebih lanjut. *Korupsi otogenik (autocorruption)* yaitu korupsi yang dilakukan seseorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahuinya sendiri. Panitera peradilan kerap melakukan korupsi seperti ini dalam administrasi pendaftaran perkara. Ketidakjelasan tarif pendaftaran membuatnya leluasa menentukan harga yang harus dibayar oleh pengacara. *Korupsi dukungan*, yaitu dukungan terhadap korupsi yang ada atau penciptaan suasana yang kondusif untuk dilakukannya korupsi. Korupsi ini dilakukan oleh elit dilembaga peradilan yang tidak mempunyai kemauan politik untuk menindak tegas bawahannya. Baca Syed Husein Alatas, *Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsinya*, Jakarta : LP3ES, 1985

⁹ Posisi yang serendah-rendahnya. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah posisi terendah baik di dunia (kenistaan abibat sanksi moral dari masyarakat maupun hukum yang berlaku), maupun di akherat kelak (Neraka Jahanam)

¹⁰ Mengutip hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa "tak seorangpun yang telah dikehendaki Allah memimpin rakyat, kemudian ketika mati ia masih dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah pasti mengharamkan surga atasnya".

hukuman yang lebih berat.¹¹ Padahal jika kita mau bercermin pada negara komunis seperti Cina, pemerintah disana tidak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepada pejabat yang terbukti melakukan tindak korupsi. Bahkan di banyak Negara lain, seorang pejabat negara mengundurkan diri karena “malu” dan merasa berdosa karena telah menggelapkan uang negara. Lalu bagaimana dengan negara kita yang *notabene* adalah negara yang religius? Nampaknya hal yang seperti tersebut diatas masih jauh dari bayangan apalagi sampai menjadi kenyataan di negara kita. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa belum ada ketegasan dan keseriusan niat pemerintah atau aparat untuk menindak pelaku korupsi dan pelanggaran moral tersebut.

Korupsi bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dilakukan, tetapi malah sudah menjadi tradisi dikalangan elit penguasa, kalangan oportunis yang memanfaatkan ‘aji mumpung’ ketika mereka diberi amanah.¹² Dimana ada kesempatan, disana ada jalan, mungkin jargon ini pulalah yang menjadi “semangat” para koruptor untuk meraup uang haram milik rakyat. Bangsa yang

selama ini membanggakan-banggakan diri akan jati diri dan nilai luhur kepribadiannya tercoreng, tercemar oleh ulah segelintir orang rakus dan sudah kehilangan rasa malunya. Lalu dimanakah letak nilai keluhuran moral ala ketimuran yang selama ini diunggulkan-unggulkan? Barangkali ini adalah salah satu bentuk degradasi moral besar-besaran yang sedang menimpa bangsa ini, dan menjadikan kita menderita penyakit lemah moral (*amoral*).¹³

Tradisi Pesantren

*Pesantren*¹⁴ merupakan lembaga utama tempat sejumlah besar umat Islam di Jawa khususnya di didik. Arti penting pesantren tidak hanya terletak pada kenyataan bahwa ia telah menanamkan sistem nilai Islam yang paling tidak telah menciptakan masyarakat yang lebih religius, tetapi juga karena kiai yang memimpin pesantren sering kali juga terlibat dalam wilayah politik.¹⁵

¹¹ Melihat fenomena yang memprihatinkan tersebut, ada baiknya jika kita, terutama para penguasa mencoba meneladani kepemimpinan rasulullah yang jujur dan bersih, serta berani menindak tegas pelaku pelanggaran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amr, Rasulullah SAW bersabda, “Saling memaafkanlah kalian tentang masalah hukuman yang terjadi di kalanganmu, tetapi kalau kasus pelanggaran itu telah sampai kepadaku, maka hukuman itu pasti akan dilakukan”.

¹² Bahwa setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya, sebuah mutiara hadist itu sebenarnya sangat ampuh jika benar-benar diresapi dan diamalkan. Setiap pemimpin tentu akan sadar sesadar-sadarnya kalau kekuasaan yang sedang dipegangnya adalah semata mata amanah dari rakyat. Amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dalam dunia tapi juga di kehidupan akherat.

¹³ Penyakit lemah moral (*amoral*) ini butuh segera ditangani dan diupayakan kesembuhannya agar jangan sampai berlanjut ke tingkat yang lebih akut. Disinilah sebenarnya peran masyarakat maupun organisasi sosial keagamaan sebagai penjaga moral sangat dibutuhkan. Keberadaannya paling tidak mampu memberikan pencerahan *plus* kontrol sosial bagi para pelaku kejahatan korupsi. Dengan membangun kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah yang pasti dimintai pertanggungjawaban, serta rasa takut terhadap hari pembalasan adalah resep mujarab bagi pengidap virus korupsi.

¹⁴ *Pesantren* adalah sistem pembelajaran dimana para murid (santri), memperoleh pengetahuan keislaman dari seorang ulama (kiai) yang biasanya mempunyai beberapa pengetahuan khusus. Pesantren merupakan lembaga keislaman yang berpengaruh dalam pembangunan sosial umat islam dan juga karena ia adalah lembaga penting tempat Kiai menjalankan kekuasaannya. Lebih jelas baca Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS, hal 28

¹⁵ Dalam hal ini, kiai menjadi media bagi umat Islam dalam meraih kepentingan-kepentingan politiknya. Kenyataan bahwa fragmentasi masyarakat terkait dengan kehadiran banyak Kiai yang menjalankan banyak pesantren, yang masing-masing mempunyai

Sebuah pesantren biasanya dijalankan oleh seorang kiai yang dibantu oleh sejumlah santri seniornya atau anggota keluarganya yang lain. Pesantren adalah bagian penting kehidupan kiai karena ia merupakan tempat dimana ia mengembangkan ajaran dan pengaruhnya melalui pengajaran. Dalam sistem pesantren, paling tidak ada tiga unsur yang saling terkait, yaitu;¹⁶ *kiai*, *santri* dan *pondok*.¹⁷ Dengan demikian, pesantren merupakan kompleks perumahan yang

independensi, otoritas, dan kekuasaan terdiri dalam kaitannya dengan yang, menunjukka bahwa peran pesantren dalam masyarakat sangat jelas. Pesantren telah menunjukkan bagaimana ia secara langsung telah berperan dalam pembangunan umat Islam. Semua pesantren telah di moderniesasi dan Kiai mereka juga terlibat aktif dalam politik. Perlunya menggambarkan pesantren ini karena kecintaan masyarakat terhadap Kiai sangat besar maka pengaruh pesantren dalam masyarakat juga nampak jelas, karena itu perubahan sikap umat Islam di masyarakatnya berkaitan dengan politik kepemimpinan secara umum mempunyai kaitan dengan perubahan dalam dunia pesantren. Baca *Ibid*, hal 27)

¹⁶ *Pertama* adalah kiai, faktor utama yang olehnya sistem pesantren dibangun. Ia adalah orang yang memberikan landasan sistem. Unsur *kedua* adalah santri, yakni para murid yang belajar pengetahuan keislaman dari Kiai. Unsur ini juga sangat penting karena tanpa santri kiai akan seperti raja tanpa rakyat. Santri adalah sumber daya manusia yang tidak saja mendukung keberadaan pesantren tetapi juga menopang pengaruh kiai dalam masyarakat. Sedangkan unsur *ketiga* adalah pondok sebuah sistem asrama yang disediakan oleh kiai untuk megamodasi pada muridnya. Pondok biasanya adalah bentuk perumahan yang sederhana dan mempunyai fasilitas yang lebih minim daripada *hall* atau *college* di universitas-universitas barat. Jika *collenge* atau *hall* menyediakan satu kamar untuk satu siswa maka pondok biasanya terdiri dari kamar bersama yang masing-masing bisa ditempati oleh lima sampai sepuluh santri. Baca *Ibid*, hal 35

¹⁷ Istilah pondok dan pesantren biasanya digunakan untuk menunjuk hal yang sama. Istilah pondok pesantren juga sering digunakan. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu *funduq* yang berarti asrama, sedangkan istilah pesantren menurut Dhofier (1982 :18) berasal dari kata santri yang berarti murid. Orang Jawa bisanya menambahkan awalan *pe* dan akhiran *an* untuk menunjukkan tempat dimana sesuatu berada. Jadi, pesantren adalah tempat dimana santri tinggal. Baca *Ibid*,

meliputi rumah kiai dan keluarganya, beberapa pondok, dan ruang belajar, termasuk Masjid.

Di dalam pesantren biasanya menggunakan sistem pembelajaran tradisional, khususnya dalam menguasai dan mengkaji sebuah *kitab*¹⁸ sebagai salah suber ilmu. Ada beberapa teknik mengajar, tetapi yang paling umum digunakan adalah *bandongan*¹⁹ dan *sorogan*.²⁰

¹⁸ Kitab berarti buku. Tetapi dalam tradisi pesantren, kitab merujuk pada karya-karya tradisional ulama berbahasa arab yang gaya dan bentuknya berbeda dengan buku moder. Mempelajari kitab di pesantren berbeda dengan mempelajari, misalnya buku teks sosiologi di perguruan tinggi. Mempelajari kitab berarti mempelajari satu kitab. Dalam bandongan, kiai hanya membaca salah satu bagian dari sebuah bab dalam sebuah kitab, menerjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Dalam suatu kesempatan kiai mungkin hanya membaca setengah halaman. Biasanya tidak ada pertanyaan yang diajukan dalam acara ini.

¹⁹ *Bandongan* adalah jenis pengajaran keagamaan yang dilakukan baik oleh Kiai maupun santri seniornya. Ini seperti kuliah yang dihadiri oleh sejumlah besar murid. Kehadiran santri tidak didasarkan baik pada tingkat pengetahuan ataupun usia mereka. Sistem dalam arti ini hanya memberikan pengajaran rutin harian kepada para santri, dimana Kiai atau santri senior membacakan karya-karya ulama terdahulu dengan menerjemahkannya kedalam bahasa lokal dan memberikan beberapa penjelasan tentangnya. Dalam sebuah pesantren biasanya terdapat beberapa acara *bandongan* yang mengajarkan kitap pada berbagai tingkat,¹⁹ dan yang terendah hingga yang tertinggi. Acara-acara seperti itu mencerminkan standar pengajaran dalam pesantren manapun. Dikarenakan setiap pertemuan hanya membahas satu bab dalam sebuah kitab, maka untuk bisa mempelajari keseluruhan kita akan menghabiskan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sistem *bandongan* berbeda dengan sistem *sorogan*. Dalam *bandongan* pengetahuan santri tentang tata bahasa Arab dianggap cukup sehingga acara ini diadakan untuk mereka yang sudah memperoleh pemahaman dasar tentang bahasa Arab dan Al-Qur'an. Baca *Ibid*,. hal 35-36

²⁰ *Sorogan* diberikan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detil tentang berbagai masalah yang dibahas dalam sebuah kitab. Acara *sorogan* biasanya hanya diikuti oleh dua atau lima orang santri, dimana yang memberikan penjelasan sering kali adalah santri senior yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam masalah-masalah

Pesantren di Indonesia telah menjadi pusat pembelajaran dan dakwah. Ia telah memainkan peran penting karena merupakan sistem pembelajaran dan pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan oleh Belanda, pesantren adalah satu-satunya sistem pendidikan di Indonesia masih memainkan perannya sebagai sebuah pusat pembelajaran, meski harus bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan sekular.²¹

Secara sosial, pesantren telah memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ia menjadi sebuah media sosialisasi formal dimana keyakinan-keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai Islam ditransmisikan dan ditanamkan melalui pengajaran. Ia juga merupakan sarana bagi pengembangan ajaran Islam dan pemeliharaan *ortodoksi*. Pesantren memang hanya salah satu contoh tradisi keserjanaan dan pemikiran-pemikiran tradisional Islam di Indonesia sekarang. Tetapi, eksistensi dari fungsi pesantren juga sangat di pengaruhi oleh aktivitas Kiainya, yang salah satunya aktif dalam wilayah kegiatan politik.²²

tertentu. Sistem ini bertujuan untuk memberikan pelatihan khusus kepada santri dan membantu mereka mengembangkan pengetahuan keahlian tertentu. Baca *Ibid.*,

²¹ Biasanya, umat islam di Indonesia lebih suka mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah umum. Meskipun banyak pesantren menyediakan sistem sekolah modern, sistem sekolah pemerintah dianggap lebih baik. Namun demikian, umat islam saleh, khususnya di Jawa Timur, lebih suka mengirimkan anak-anak mereka ke pesantren modern karena disana anak-anak masih menerima pengetahuan islam selain pengetahuan sekular.

²² Sebagai contoh: Pesantren Tebuireng Jombang, dipimpin oleh KH. Yusuf Hasyim, seorang tokoh dan politisi islam nasional. Pesantren Darul Ulum Jombang di pimpin oleh kiai As'ad Umar, seorang anggota DPR. Pesantren Bahrul Ulum Jombang pertama kali dipimpin oleh kiai Wahab Chasbullah, seorang politisi dan

Konsep dan Varian Kiai

Sudah menjadi kebiasaan umum (diseluruh dunia islam) bagi seorang ulama terkenal untuk menjalankan sebuah lembaga pendidikan agama. Di Indonesia, lembaga ini secara tradisional disebut pesantren, yang di bina oleh seorang Kiai. Memang tidak semua Kiai memiliki pesantren, namun yang jelas adalah bahwa Kiai yang memiliki pesantren mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada Kiai yang tidak memilikinya.

Di berbagai daerah di Indonesia penggunaan istilah *Ulama*²³ berbeda dengan istilah *Kiai*²⁴, perbedaan ini berhubungan dengan peran dan pengaruhnya di masyarakat. Di Jawa variasi penggunaan seperti itu tidak muncul setegas di Madura. Semua ulama dari tingkat tertinggi hingga yang terendah disebut Kiai. Dengan kata lain, istilah Kiai di Jawa tidak mesti merujuk mereka yang menjalankan pesantren, tetapi juga dapat diterapkan kepada guru ngaji atau imam masjid yang memiliki pengetahuan keislaman dibandingkan dengan warga yang lain. Lebih dari itu, hierarki keulamaan di Jawa berbeda dengan di Madura. Ia tidak terkait dengan struktur

pendiri organisasi islam terbesar di Indonesia, NU. Baca Endang Turmudi, *op.cit.* hal 27

²³ Ulama adalah istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang muslim yang berpengalaman. Kaum ulama adalah kelompok yang "secara jelas mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai cendekiawan penjaga tradisi yang dianggap sebagai dasar identitas primordial individu dan masyarakat" Dengan kata lain, "fungsi ulama yang terpenting adalah peran ortodoks dan tradisional mereka sebagai penegak keimanan dengan cara mengerjakan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan ortodoks dikalangan umat islam" Baca, *Ibid.* hal 29

²⁴ Istilah lokal yang digunakan untuk menunjukkan berbagai tingkat keulamaan; dan istilah di Indonesia yang paling sering digunakan untuk merujuk tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah Kiai. Baca *Ibid.*,

formal apapun, tetapi lebih terletak dalam pengakuan sosial sehingga agak sulit mengenali tingkat kekiaian seseorang. Hanya mereka yang menjalankan pesantren yang bisa dikenali dengan mudah. Mereka dianggap sebagai Kiai yang lebih tinggi derajatnya.

Dibandingkan dengan Madura, kekiaian di Jawa, termasuk Jawa barat tampak lebih terbuka, dalam arti ia di bentuk dalam pola yang lebih berorientasi pada prestasi. Meskipun beberapa Kiai terkenal di daerah-daerah ini berasal dari keluarga Kiai, namun kekiaian tidak melekat dalam struktur sosial yang ada pengakuan Kiai di daerah-daerah ini didasarkan pada pengakuan sosial. Sepanjang seseorang mempunyai pengetahuan Islam yang luas maka anggota masyarakat akan dengan mudah mengakuinya sebagai seorang Kiai. Maka, seorang santri yang tidak berasal dari keluarga Kiai juga dapat memperoleh predikat Kiai. Tidak jarang ditemukan seorang santri yang sangat pintar kemudian dinikahkan dengan putri Kiai hanya untuk melanjutkan kepemimpinan sang Kiai atas pesantrennya ketika ia menganggap tidak ada seorang pun anggota keluarganya yang dapat menggantikannya. Selain itu, ada juga santri yang menikah dengan putri seorang petani kaya dan kemudian diminta untuk mendirikan pesantren. Perbedaan lain antara kekiaian di Madura dan Jawa ditunjukkan oleh kenyataan bahwa di Jawa, struktur kekiaian yang ada tidak bersifat hierarkis.

Dari berbagai tingkat keulamaan di Jawa, hanya ulama yang lebih tinggi, yakni Kiai, yang mempunyai pengaruh lintas desa. Seorang ustadz biasanya mempunyai pengaruh lokal yang terbatas, tidak saja karena pengetahuan keislamannya tidak seluas Kiai, tetapi

juga karena ia tidak mempunyai pesantren sebagai pusat pembelajaran. Pesantren adalah lembaga penting yang terkait dengan kekiaian seseorang.²⁵

Melalui pesantrenlah seorang Kiai membangun pola *patronase* yang menghubungkannya dengan para santrinya dan juga masyarakat yang berada diluar desa atau kotanya sendiri. Pola *patronase* ini dengan mudah dapat dibangun karena kebanyakan, jika bukan semua, pesantren dimiliki oleh Kiai. Pesantren juga menghubungkan para orang tua santri dengan para Kiai dimana para orang tua santri secara psikologis merasa berhutang budi kepada sang Kiai dikarenakan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan gratis di pesantren. Lebih dari itu, pengaruh yang lebih luas dan pola kepemimpinan Kiai yang lintas desa memudahkannya berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Kiai kadang-kadang juga memainkan peran perantara dalam mentransmisikan pesan-pesan pemerintah tentang pembangunan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat lebih mudah menerima program pemerintah bila itu dikemukakan oleh seorang Kiai.²⁶

Kiai dapat dibedakan menjadi empat kategori²⁷, yaitu *kiai pesantren*²⁸, *kiai*

²⁵ Kiai biasanya memiliki pesantren, namun tidak berarti bahwa semua kiai besar memiliki pesantren. Kiai Syamsuri Badawi, salah seorang kiai yang paling dihormati, tidak mempunyai pesantren. Ia dulu mengajar di Pesantren Tebuireng namun kemudian menjadi anggota DPR pusat.

²⁶ Di Madura, misalnya, dimana ketundukan masyarakat kepada kiai lebih kuat, pemerintah melalui kiai, berhasil mengirimkan para "transmigran spontan" dari Madura. Tanpa keterlibatan kiai, program seperti itu akan mengalami kesulitan

²⁷ Lebih jelas baca Endang Turmudi, *op.cit*, hal 32-35

²⁸ *Kiai pesantren* memusatkan perhatiannya pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pendidikan. Hubungan antara santri dengan Kiai menyebabkan keluarga santri secara

*tarekat*²⁹, *kiai politik*³⁰, dan *kiai panggung*³¹ sesuai dengan kegiatan-kegiatan khusus mereka dalam pengembangan Islam. Meskipun demikian, pada kenyataannya seorang kiai dapat digolongkan dalam lebih dari satu kategori kekiaian tersebut. Dari empat kategori tersebut, kekiaian dapat dibagi dua kategori yang lebih besar dalam kaitannya dengan para pengikutnya. Kategori *pertama* adalah kiai yang mempunyai pengikut yang lebih banyak dan pengaruh yang lebih luas daripada kiai yang masuk kategori

kedua. Pengaruh kiai yang masuk kategori pertama menyebar keseluruh daerah, selain daerahnya sendiri karena sebagian pengikutnya berasal dari kota-kota lain, bahkan provinsi lain. Kategori yang pertama ini terdiri dari Kiai pesantren dan Kiai tarekat. Sedangkan kategori *kedua* terdiri dari kiai panggung dan kiai politik.

Perilaku Kiai Politik dan Korupsi

Dalam fiqh ada tindakan-tindakan yang sangat dilarang, karena kemanfaatannya hanya kembali kepada pribadi dan kelompoknya saja, sedangkan negara dan rakyat dirugikan. Tindakan itu adalah : *Pertama: risywah* (suap), seperti uang pelicin, money politic, dll. *Kedua: khiyanat*, seperti mark up, penyalahgunaan fasilitas Negara. *Ketiga: Ghulul* (penggelapan), *Keempat: Muksu* (pemerasan). Keempat jenis ini bisa termasuk perbuatan korupsi.

Selain itu ada juga beberapa praktek korupsi, antara lain, *Pertama*, menerima *ujrah* (gaji/honor dan fasilitas lainnya) yang diterima secara penuh, bahkan lebih dari yang sewajarnya, sementara tugas dan kewajibannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. *Kedua*, memberikan uang yang tidak seharusnya. *Ketiga*, uang komisi yang bertujuan untuk membenarkan yang batil dan membatalkan yang benar. *Keempat*, pemberian uang kepada para tokoh agama, masyarakat, dan yang lain, dari pejabat pemerintah atau dari tokoh partai politik. Pemberian jelas tidak cuma-cuma. Ada tujuan politis yang ada di balik pemberian ini, apakah untuk mendukungnya, memberikan legitimasi, atau yang lebih tragis lagi, menarik gerbong umat lewat para Kiai dan tokoh tersebut.

Begitu dekat pesantren dengan konstelasi politik baik skala lokal,

tidak langsung menjadi pengikut sang Kiai. Katika orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada seorang Kiai maka secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Kiai itu adalah orang yang patut untuk di ikuti dan seorang pengajar yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan Islam. Santri adalah sumber pendukung lain bagi Kiai pesantren. Santri tidak saja penting bagi eksistensi pesantren, tetapi juga menjadi sumber yang menjamin eksistensinya dimasa mendatang selain itu, santri adalah sumber jaringan yang menguhungkan suatu pesantren dengan pesantren yang lain. Mereka yang menyelesaikan pendidikan disuatu pesantren dan kemudian menjadi kiai maka mereka membangun jaringan yang menghubungkan antara mereka dengan kiai pesantren dimana mereka nyantri atau dengan penggantinya yang melanjutkan kepemimpinan pesantren.

²⁹ *Kiai tarekat* memusatkan kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam karena tarekat adalah sebuah lembaga formal, para pengikut Kiai tarekat adalah anggota formal gerakan tarekat. Jumlah para pengikut ini bisa lebih banyak dari pada pengikut Kiai pesantren karena melalui cabang diberbagai kota di Indonesia para anggota tarekat secara otomatis menjadi pengikut Kiai tarekat.

³⁰ *Kiai politik* lebih merupakan kategori campuran dia merujuk pada para kiai yang mempunyai *concern* untuk mengembangkan NU secara politis. Pengembangan NU dalam kurun waktu yang lama dikelola oleh kategori kiai ini yang tidak mempunyai pengikut seperti kiai lain.

³¹ *Kiai panggung* adalah para da'i mereka menyebarkan dan mengembangkan Islam melalui kegiatan dakwah. Para pengikut Kiai panggung mungkin tersebar diseluruh kabupaten. Seorang Kiai panggung yang mempunyai pengikut dari kabupaten-kabupaten lain. Namun demikian, hal itu jarang terjadi karena hanya Kiai panggung yang populer saja yang biasa diundang memberikan ceramah di kabupaten lain. Kebanyakan Kiai panggung bersifat lokal dalam arti hanya dikenal oleh umat Islam di daerahnya saja sementara itu.

regional, dan nasional, sehingga tidak asing kalau pesantren selalu bergesekan dengan konstelasi politik yang ada. Seorang Kiai yang merupakan pemegang tongkat kendali pesantren, tidak jarang merupakan seorang politisi yang andal, lincah dan professional. Pengaruhnya yang besar menjadi ikon Kiai politik yang berwibawa tidak hanya di hadapan masyarakat, tapi juga birokrasi, pengusaha dan partai politik. Namun, ketika gesekan dan tuntutan politik kemudian merembet dari wilayah privat public Kiai ke wilayah privatnya, hal inilah yang merupakan sumber terjadinya praktek korupsi, dan ini fenomena asing tapi lumrah di pesantren saat ini.

Kenyataan bahwa banyak di antara Kiai yang melakukan sesuatu yang justru bisa mendorong orang lain "*terpaksa*" melakukan korupsi misalnya anggota dewan yang "*terpaksa*" korupsi karena ketika menjelang dan selama pemilu dia sudah terkanjur habis banyak karena dimintai dana sana-sini.³² Juga gubernur/bupati/wali kota/pejabat dan pimpinan lembaga masyarakat yang terpaksa korupsi saat menjabat karena untuk menservis anggota dewan. Padahal tidak sedikit juga kiai yang menjadi dewan dan gubernur/bupati/wali kota/pejabat dan pimpinan lembaga masyarakat.³³

³² Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan saat ini korupsi merajalela dan dilakukan oleh semua kalangan termasuk para Kiai. "Korupsi merajalela di setiap tempat. Oleh para birokrat, bahkan para Kiai sudah katut (tutut serta)," tukas Gus Dur saat memberikan sambutan Munas Alim Ulama dan Halagoh Kebangsaan PKB di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (19/5/2008).

³³ Sebanyak 20 kiai yang menjadi pengelola yayasan panti asuhan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terindikasi terlibat kasus korupsi dana bantuan yayasan panti asuhan yang dikelolanya. "Ini sesuai hasil pemeriksaan terhadap 20 kiai penerima dana bantuan

Realita yang kita saksikan dewasa ini, banyak Kiai lebih sibuk mengurus kepentingan di luar pondok dari pada pondoknya sendiri. Sehingga waktu untuk mengurus santri terkuras oleh kepentingan di luar pondok. Sejatinya, seorang Kiai harus harus lebih memprioritaskan kepentingan pondok dari pada kepentingan di luar pondok apalagi kepentingan pribadi.

Yang lebih memprihatinkan lagi, dewasa ini, banyak Kiai yang tergiur oleh politik praktis. Kiai ingin jadi politikus. Keinginan itu tidak salah, hanya saja permasalahannya Kiai harus lebih memprioritaskan kepentingan pondok dari pada kepentingan politik. Mungkinkah kesibukkan politik itu tidak mempengaruhi atau menyita waktu untuk santri?

Di samping itu juga, sebuah pesantren harus berdiri di atas dan untuk semua golongan. Pesantren adalah milik umat, bukan milik partai atau kelompok tertentu. Karena pesantren terdiri dari berbagai macam unsur masyarakat. Maka, seharusnya Kiai tidak "menganjurkan" memihak pada salah satu partai tertentu, dalam rangka memenuhi hasrat politiknya ataupun memenuhi pesanan dari pihak lain.

Kalau dilihat dari kekuatan massa, pesantren memang sangat strategis untuk dijadikan basis kekuatan suatu partai. Karena itulah banyak caleg, cabup atau

panti asuhan di Pamekasan, yang kami lakukan," kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan Badrut Tamam, Kamis (2/4/09). Pengelola panti asuhan itu semuanya kiai, yakni tokoh agama di wilayah tersebut. Bahkan, 60 persen di antaranya merupakan pengasuh pondok pesantren. Dari 20 orang yang diperiksa tersebut, semuanya terindikasi melakukan penyimpangan atau tidak menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya seperti digunakan untuk pembangunan, kelengkapan prasarana dan sarana, serta kebutuhan lainnya. Media Indonesia : 02 April 2009

cagub menjadikan pesantren sebagai tempat untuk mengumpulkan kekuatan massa. Pesantren lebih khusus lagi Kiai, sangat berpengaruh di kalangan masyarakat apalagi di Madura. Melihat dari begitu kuatnya pengaruh seorang Kiai, membuat banyak partai yang menggaet Kiai sebagai mitra politiknya terutama partai-partai yang berasaskan Islam.

Anehnya, banyak Kiai yang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu ataupun tidak mau tahu, kalau pesantrennya dijadikan kepentingan politik. Lebih parah lagi seorang Kiai kadang menyuruh santrinya untuk memilih partai tertentu yang dianggap berjasa kepada pondok atau kepada Kiai. Inikan sangat ironis, pesantren yang pada dasarnya lembaga pendidikan, tempat untuk menimba ilmu agama, dijadikan ajang politik.

Kenyataan di ataslah yang harus mendapatkan perhatian secara lebih serius dari semua pihak. Sebab, jika kenyataan tersebut terus dipertahankan sebagai tradisi yang lumrah, maka jangan harap korupsi dimasa mendatang bisa dikurangi. Bisa-bisa malah sebaliknya korupsi di masa mendatang akan lebih mengerikan. Kiai diharapkan bisa menjadi pemberi fatwa atau nasihat yang jujur, objektif dan jernih. Tidak hanya kepada santri dan umatnya, melainkan juga kepada penguasa.

Jika Kiai berakrab-akrab dengan penguasa, dikhawatirkan, kejujuran obyektifitas dan kejernihan fatwanya menjadi terpolusi. Jika ini yang terjadi, maka fatwa Kiai cenderung disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku penguasa. Dan sebaliknya jika ada kebijakan yang keliru dari sang penguasa sangat mungkin sang kiai tidak berani

mengingatkan karena adanya perasaan ewuh pakewuh.

Apalagi jika kedekatan dengan sang penguasa (gubernur/bupati/wali kota) itu dimanfaatkan oleh Kiai untuk minta-minta sumbangan, jariah atau apalah namanya kepada penguasa itu. Jika itu yang terjadi, dampaknya akan mempengaruhi moralitas penguasa dan santrinya, anatara lain: *Pertama*, hal itu akan membuat posisi penguasa serba repot, tidak memberi atau tidak mengabulkan permohonan sumbangan, ya tidak enak. Tapi kalau mau mengabulkan, bisa-bisa dana penguasa habis sebelum waktunya. Padahal dana yang dimiliki seorang bupati/gubernur ada batasnya. Jika sampai dana menipis atau habis, lalu harus kemana lagi seorang penguasa untuk tetap bisa memberikan sumbangan sebagaimana yang dimintas Kiai? Sangat mungkin, larinya mencari dana-dana siluman. Hal inilah yang mendorong terjadinya korupsi di birokrasi.

Kedua, tidak menutup kemungkinan kebiasaan Kiai meminta sumbangan kepada penguasa itu ditiru oleh para santrinya ataupun umat pada umumnya, serta tidak mendidik berusaha dengan cara yang lebih bermartabat.

Penutup

Prinsip dasar nilai agama terhadap kejahatan korupsi adalah ajaran amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, dan mencegah kemunkaran. Korupsi bisa dikonotasikan sebagai bagian dari tindakan munkar. Di lingkungan pesantren, Kiai konservatif mentradisikan kehidupan *wara'*, *eskatis*. Dalam pengertian, Kiai sebagai layaknya manusia membutuhkan materi dunia, tetapi tidak mendekatkan materi dunia sebagai tujuan hidupnya. Prinsip

kesahajaan, keikhlasan, dan kepasrahan, menuntun para Kiai pada terbentengi dari praktik keserakahan (egoisme materiil).

Penggunaan institusi agama sebagai bagian dari gerakan anti korupsi sebetulnya merupakan langkah yang baik. Namun, efektifitasnya barangkali masih perlu dipertanyakan. Dilingkungan NU misalnya, Kiai sebagai patron masyarakat bisa digunakan sebagai tekanan bagi birokrasi untuk mengurangi praktik korupsi. Namun, yang dilakukan kiai hanya bisa dilakukan dalam batas-batas gerakan kultural. Artinya, mereka bisa membuat himbauan-himbauan moral agar masyarakat menghindari perilaku-perilaku korupsi. Sayangnya, secara kultural tidak ada tradisi dilingkungan jagad kiai untuk hal itu.

Mengapa? Salah satu yang paling penting dari praktik korupsi adalah pemilahan secara tegas wilayah privat dan publik. Dalam tradisi kiai, hal ini tidak ada. Artinya, dalam manajemen dilingkungan kiai, antara dominan privat dengan publik cenderung menyatu. Akuntabilitas dalam manajemen kiai tidak bersifat horisontal, tetapi vertikal.

Kiai tidak mempunyai tradisi keharusan mempertanggung jawabkan dana-dana yang didapat dari masyarakat kepada masyarakat. Setiap dana yang diberikan kepada kiai, bisa bermakna untuk kepentingan publik maupun pribadi kiai itu sendiri. Hambatan kultural inilah yang membuat manajemen perkiaian agak rentan terhadap praktik korupsi. Persoalannya menjadi lebih rumit ketika komunitas kiai banyak yang

memasuki jagad birokrasi dan politik. Sejumlah kiai banyak yang menjadi politisi dan duduk diparlemen, baik ditingkat daerah maupun pusat, padahal posisi tersebut merupakan wilayah publik. Tradisi yang tidak ada pemisahan antara wilayah privat dan publik menjadikan mereka lebih mudah terseret ke dalam sistem koruptif.

Karena itu, penggunaan institusi keagamaan dalam gerakan anti korupsi tidak cukup dibiarkan berjalan sendiri. Gerakan antikorupsi merupakan perwujudan pendekatan normatif ke tingkat operasional. Konsep yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah uswatun khasanah atau keteladanan. Organisasi NU dan Muhammadiyah memiliki banyak peluang menciptakan keteladanan. Harus diimbangi langkah-langkah struktural seperti penegakan hukum dan sistem perundangan-undangan yang makin mempersempit peluang bagi praktik korupsi.

Untuk ini, diperlukan kearifan berfikir dan pemahaman tentang posisi yang diembanya apakah peran yang dilakukan masuk dalam ranah privat atau publik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan, yang ini merupakan cikal bakal terjadinya tindakan koruptif. Sehingga dengan demikian, prinsip amanah dalam menjalankan setiap peran yang di embannya terwujud dengan baik pada perilaku pemimpin agama (ulama dan Kiai), pejabat birokrasi dan seluruh pengemban amanah, baik sebagai umat beragama (Islam khususnya) maupun warga negara, yang tentunya di harapkan berkiprah sesuai dengan profesinya. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb*□

